

Pengaruh Ni Una Menos Sebagai Transnational Advocacy Networks dalam Legalisasi Aborsi di Argentina

Iman Amirullah¹, Seftiana Kuswardini², Aditya Maulana Hasymi³

⁴*Prodi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta*

Abstract

Abortion has long been a controversial issue in Argentina. In the Criminal Law article 86 of 1921, the government only allows abortions to be performed in cases where the pregnancy is considered to endanger the life of the mother or when the pregnancy is a result of rape on a woman with mental disabilities. Restrictions on access to abortion result in high rates of unsafe and illegal abortions in Argentina, which increases the risk of maternal death and various other health and economic risks. The Ni Una Menos movement, which was born in 2015, became a turning point for the legalization of abortion in Argentina. Ni Una Menos successfully changed the orientation and tactics of the women's movement in Argentina, which previously focused on middle-class academia groups and political lobbying, into a movement of demonstrations and general strikes in the streets of Argentina. This movement went on to play a significant role in the enactment of rules regarding the legalization of abortion without conditions up to 14 weeks of pregnancy in 2020.

Keywords: *Ni Una Menos; Social Movement; Abortion; Gender-Based Violence; Argentina*

Abstrak

Aborsi di Argentina selama ini menjadi salah satu isu yang cukup kontroversial. Dimana dalam undang-undang Hukum Pidana pasal 86 tahun 1921, pemerintah hanya mengizinkan aborsi dilakukan pada kondisi dimana kehamilan dianggap membahayakan kehidupan sang ibu dan saat pada kondisi kehamilan diakibatkan oleh pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas mental. Pembatasan akses terhadap aborsi ini mengakibatkan tingginya tindakan aborsi ilegal dan tidak aman di Argentina yang meningkatkan resiko kematian ibu dan berbagai resiko kesehatan maupun ekonomi lainnya. Gerakan Ni Una Menos yang lahir pada tahun 2015 menjadi titik baru bagi gerakan legalisasi aborsi di Argentina. Ni Una Menos berhasil merubah orientasi dan taktik gerakan perempuan di Argentina yang sebelumnya berorientasi pada kelompok akademik kelas menengah dan lobi-lobi politik menjadi gerakan demonstrasi dan pemogokan umum di jalan-jalan Argentina. Gerakan ini selanjutnya memiliki peran sangat besar dalam terbitnya aturan mengenai legalisasi terhadap aborsi secara tanpa syarat hingga usia kehamilan 14 minggu pada 2020.

Kata kunci: *Ni Una Menos; Social Movement; Abortion; Gender-Based Violence; Argentina*

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta

² Program Studi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta

³ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta

⁴ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Laboratorium Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan

Pendahuluan

Diskursus mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) telah mewarnai gerakan feminisme global sejak lebih dari 20 tahun lalu. HKSR pertama kali mengemuka sebagai sebuah bagian dari tuntutan atas hak asasi manusia (HAM) sejak International Conference on Population and Development (ICPD) yang diadakan di Kairo, Mesir pada tahun 1994 dan Fourth World Conference on Women pada tahun 1995 di Beijing (Dhewy, 2017). Proses implementasi pemenuhan terhadap HKSR utamanya bagi perempuan hingga saat ini masih terus menjadi tantangan tersendiri, utamanya dalam isu-isu tertentu yang cenderung dianggap tabu dan kontroversial seperti aborsi. Hingga saat ini, masih banyak negara enggan mengakui aborsi sebagai bagian dari HKSR yang harusnya dapat diakses atau bahkan disediakan layanannya oleh negara.

Dalam konteks Hubungan Internasional (HI), isu HKSR dan aborsi tidak bisa dilepaskan dari proses integrasi feminisme dan isu gender dalam praktek maupun studi Hubungan Internasional kontemporer. Feminisme sendiri dilihat sebagai upaya para ilmuwan HI dalam memberikan visibilitas terhadap kelompok perempuan maupun gender minoritas lainnya yang selama ini peran maupun perspektifnya dipinggirkan. Studi dan praktek HI yang selama ini dianggap terlampaui maskulin mengakibatkan isu-isu terkait kepentingan perempuan dianggap sebagai isu pinggiran yang bukan menjadi bagian dari studi hubungan internasional (Smith, 2017).

Proses integrasi feminisme selanjutnya berangkat dari semangat untuk bukan hanya menghadirkan kesetaraan gender, tapi mewujudkan perdamaian secara utuh. Ilmuwan feminis, Cynthia Enloe dalam *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, memberikan kritikan mengenai bagaimana ilmuwan HI klasik memandang perdamaian secara maskulin dan mempertanyakan kembali makna perdamaian yang hendak dicapai oleh para ilmuwan HI. Lebih lanjut ia menggarisbawahi bahwa garis pembeda antara apa yang disebut sebagai masalah internasional dan masalah personal sejatinya layaknya dua sisi mata uang koin. Melalui dekonstruksi menggunakan kerangka feminisme ini Enloe mengajak untuk merefleksikan kembali perspektif dalam memahami bagaimana politik internasional mempengaruhi kehidupan manusia, apapun identitas gendernya, hingga ke level paling personal (Enloe, 1989).

Melalui kerangka feminisme Enloe, isu HKSR khususnya aborsi dengan segera menemukan relevansinya sebagai objek penelitian dalam studi hubungan internasional. Hal ini karena akses atas aborsi dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya bersifat universal. Aborsi juga tidak dapat dilihat sekadar sebagai isu personal karena kebutuhan maupun tuntutan akan aborsi tidak berada di dalam ruang hampa. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan struktural, kekerasan berbasis gender, hingga hak atas otonomi tubuh harus dengan segera dipahami sebagai masalah global yang memerlukan penyelesaian dalam kerangka non-personal.

Secara general, aborsi merupakan tindakan atau praktik medis yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mengakhiri kehamilan pada kondisi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Konteks “secara sengaja” ini lah yang menjadi fokus kontroversi dalam berbagai diskursus mengenai aborsi (Munson, 2020). Banyak norma tradisional dan religius memandang aborsi sebagai tindakan tercela dan berdosa, sehingga mengakibatkan banyak

perempuan tidak dapat mengakses layanan aborsi yang aman dan legal sehingga praktik aborsi bawah tanah yang tidak aman menjadi satu-satunya alternatif bagi perempuan untuk mendapatkan hak atas pelayanan aborsi. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan perempuan seperti kerusakan organ reproduksi hingga tingginya angka kematian ibu (Francome, 2016).

Kondisi ini tentu terjadi pula di Amerika Latin, sebuah kawasan dimana kehadiran institusi religius, yaitu Gereja Katolik begitu kuat dan mengakar baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat maupun sistem hukum. Hal ini menjadikan Amerika Latin menjadi salah satu kawasan dengan pembatasan aborsi paling ketat di dunia. Hingga saat ini, legalisasi serta dekriminialisasi terhadap tindakan aborsi secara total di kawasan ini hanya dapat dilakukan di Kuba, Uruguay, serta Meksiko yang hanya melegalkannya di level provinsi tertentu (Daby & Moseley, 2022).

Sedangkan beberapa negara lainnya telah melakukan langkah yang cukup progresif meskipun masih terdapat berbagai pembatasan baik dari durasi kehamilan maupun kondisi penyebab aborsi. Misalnya di Chile, pada 2017 lalu telah mengakhiri pembatasan aborsi totalnya dengan mengizinkan tindakan aborsi untuk dilakukan pada kondisi dimana kehamilan akan membahayakan nyawa sang ibu (Daby & Moseley, 2022).

Proses perubahan kebijakan untuk membuka akses terhadap layanan aborsi terjadi pula di Argentina. Pada Desember 2020, dimana Senat Argentina menerbitkan Undang-Undang Voluntary Termination of Pregnancy yang memberikan legalisasi terhadap tindakan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu. Penerbitan undang-undang ini merupakan puncak keberhasilan upaya gerakan feminis Argentina yang telah memperjuangkan isu ini pasca kegagalan upaya serupa di Senat Argentina pada tahun 2018. Argentina menjadi negara Amerika Latin ketiga setelah Kuba dan Uruguay yang telah jauh terlebih dahulu melakukan legalisasi terhadap tindakan aborsi (Ruibal, 2022).

Undang-undang ini menandai proses liberalisasi terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi di Argentina. Sebelumnya, Argentina memberlakukan larangan secara total terhadap akses aborsi bahkan untuk kehamilan akibat kasus pemerkosaan. Pengecualian yang diizinkan untuk akses aborsi adalah saat kehamilan dianggap oleh tenaga medis membahayakan kehidupan ibu atau jika kehamilan tersebut merupakan akibat pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas mental (Human Rights Watch, 2005). Pembatasan terhadap layanan aborsi ini mengakibatkan tingginya tindakan aborsi tidak aman yang dilakukan secara ilegal melalui metode-metode yang mengancam nyawa.

Amerika Latin juga menjadi kawasan dengan tingkat aborsi tidak aman tertinggi di dunia dan disertai dengan tingkat kematian ibu akibat aborsi paling tinggi pula. Secara global, pada tahun 2010-2014, terhitung ada 25 juta aborsi tidak aman terjadi di dunia, dan sebanyak 4,9 juta diantaranya terjadi di Amerika Latin atau sebesar 20% dari keseluruhan kasus aborsi tidak aman global, data ini tentu sebenarnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan angka praktik aborsi tidak aman yang tidak tercatat (Monteverde & Tarragona, 2019). Di Argentina sendiri, fenomena aborsi tidak aman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi telah menjadi penyebab utama tingginya kematian ibu di Argentina sejak 1980an. Tiap tahunnya, rata-rata 400.000 praktik aborsi tidak aman dilakukan oleh perempuan Argentina dengan angka kematian ibu mencapai lebih dari 20% (Ramos et al., 2014).

Sebagai sebuah negara yang cukup konservatif, aborsi adalah isu yang sangat kontroversial di Argentina, dimana lebih dari 60% penduduknya beragama Katolik dan 15% beragama Kristen evangelis, dan pimpinan kedua kelompok religius ini menentang praktik aborsi secara ketat (de las Nieves Puglia et al., 2018). Lebih lanjut, gereja Katolik memiliki posisi yang sangat terhormat dalam kehidupan sosial masyarakat Argentina. Gereja Katolik dianggap sebagai otoritas legitimasi moral tertinggi (Blofield, 2013).

Dalam doktrin Katolik, tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang secara otomatis dianggap sebagai tindakan terkutuk dan berdosa. Maka tentu tidak mengherankan jika masyarakat Argentina cenderung menganggap aborsi sebagai tindakan yang terlarang bahkan dimusuhi (Blofield & Ewig, 2017).

Namun tentunya, perubahan terus terjadi di Argentina, dimana kekuatan intervensi gereja Katolik terhadap negara mulai menurun semenjak proses demokratisasi di negara tersebut pada 1983. Misalnya perceraian yang dilarang dalam ajaran Katolik dan dilarang pula dalam sistem undang-undang hukum pidana Argentina telah dilegalisasikan lewat reformasi sistem hukum pernikahan Argentina pada 1987.

Maka tak mengherankan pula jika isu aborsi mengalami perubahan pandangan pula dalam masyarakat Argentina hingga pada puncaknya berhasil melakukan perubahan kebijakan untuk melegalkan tindakan aborsi (Blofield, 2013).

Perubahan pandangan dan kebijakan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan feminis Argentina yang telah berjuang melalui berbagai sektor selama lebih dari 30 tahun. Aliansi La Campaña por el Derecho al Aborto Legal yang didirikan sejak 2005 telah secara konsisten berkampanye secara militan dan memperluas dukungan dari berbagai organisasi sosial, universitas, partai politik, hingga serikat pekerja.

Kampanye-kampanye ini dilakukan melalui berbagai metode mulai dari puluhan konferensi, ratusan pameran, demonstrasi, hingga kampanye media sosial menggunakan berbagai tagar seperti #NiUnaMenos, #ApoyoElAbortoLegal, #VotenAbortoLegal, dan #AbortoLegalYa. Berbagai kampanye ini dianggap telah berperan dalam peningkatan penerimaan terhadap dekriminialisasi dan legalisasi aborsi di negara tersebut. (de las Nieves Puglia et al., 2018).

Dalam survey Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPES) selama bulan Mei 2018 menemukan bahwa 62% penduduk Argentina menyetujui upaya dekriminialisasi dan legalisasi akses aborsi. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan, upaya untuk melakukan legalisasi terhadap aborsi pada 2018 digagalkan oleh Senat Argentina (de las Nieves Puglia et al., 2018).

Gerakan Ni Una Menos yang dapat diterjemahkan sebagai “Tidak ada (perempuan) yang Ditinggalkan” dalam Bahasa Indonesia ini lahir pada pertengahan 2015 ditengah meledaknya kemarahan masyarakat Argentina atas berbagai tingginya angka femisi di negara tersebut. Kelahiran Ni Una Menos dianggap sebagai salah satu titik utama radikalisasi gerakan perempuan Argentina. Ni Una Menos mengubah orientasi strategi dan taktik gerakan perempuan di Argentina dari yang sebelumnya berorientasi pada kelompok akademik, kelas

menengah, dan lobi-lobi politik menjadi gerakan demonstrasi dan pertemuan jalanan hingga pemogokan umum. (Anderson, 2022).

Dalam pertemuan-pertemuan jalanan yang diadakan Ni Una Menos yang biasa disebut sebagai *encuentros* dihadiri rata-rata 30.000 hingga 70.000 peserta. Pada puncaknya, dalam demonstrasi Hari Perempuan Internasional 2018, Ni Una Menos mengorganisir demonstrasi di Buenos Aires yang dihadiri 500.000 hingga 1.000.000 peserta (Anderson, 2022).

Ni Una Menos juga melebarkan isu perjuangannya dengan menganggap aborsi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang perlu diperjuangkan untuk melindungi kehidupan manusia, khususnya perempuan. Melalui pembingkaiannya sebagai isu keadilan sosial dan kesehatan masyarakat – bukan dalam kerangka Amerika Serikat, yang menganggapnya sebagai hak individu – Ni Una Menos berhasil menjadikan hak aborsi sebagai isu populis.

Dengan didukung oleh data yang dihimpun *America's Barometer* selama 2012-2019 yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan Argentina dalam gerakan sosial politik telah meningkat drastis sejak kemunculan Ni Una Menos yang diikuti dengan perubahan opini publik menjadi semakin positif terhadap aborsi. Maka tentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ni Una Menos menjadi salah satu aktor utama – bukan aktor tunggal – pada keberhasilan perjuangan gerakan perempuan Argentina dalam meraih legalisasi terhadap layanan aborsi pada 2020 (Taylor et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, keberhasilan proses perubahan kebijakan untuk melegalisasi aborsi di Argentina yang dimotori oleh Ni Una Menos tentu menjadi sebuah hal yang bukan hanya menakjubkan, namun juga menunjukkan bagaimana gerakan masyarakat sipil dapat menjadi aktor non-negara yang bukan hanya menekan, tapi bahkan mendorong perubahan kebijakan sebuah negara.

Keberhasilan ini juga menjadi pembuktian pentingnya gerakan perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan itu sendiri. Dimana gerakan perempuan yang kuat dan mengakar rumput berperan sangat besar dalam mendorong perubahan kebijakan untuk memenuhi hak-hak dasar kelompok perempuan yang selama ini terabaikan dan dimarjinalkan. Proses perubahan baik pandangan masyarakat maupun kebijakan pemerintah yang lebih terbuka terhadap akses aborsi di Argentina tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya untuk mengetahui bagaimana peranan atau pengaruh gerakan Ni Una Menos dalam proses legalisasi Aborsi di negara tersebut.

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan “pengaruh Ni Una Menos sebagai gerakan *Transnational Advocacy Networks* dalam mendorong legalisasi aborsi di Argentina selama periode 2015-2020?” Penelitian ini menjadi penting pula menurut peneliti untuk menjadi referensi bagi aktivis dan gerakan perempuan di Indonesia dalam proses mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak bagi kelompok perempuan dan minoritas gender lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian deskriptif sendiri menurut diartikan sebagai proses pengumpulan data berupa unsur, ciri, dan sifat dari suatu fenomena atau studi kasus. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan data-data

melalui sumber yang valid seperti buku, jurnal, artikel, liputan, dan video yang tersedia baik secara online atau offline. Penelitian menggunakan metode deskriptif ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan secara akurat dan sistematis terhadap fenomena atau studi kasus yang tengah diteliti (Suryana, 2010).

Sedangkan metode penelitian deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan atau menjabarkan secara sistematis dan objektif terkait peranan gerakan Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* dalam proses legalisasi aborsi di Argentina pada periode 2015-2020. Peneliti hendak mengemukakan temuan-temuan yang ada yang bersumber dari proses pengkajian terhadap dokumen yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif sendiri merupakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif. (Suryana, 2010)

Mengutip buku “Metode Pendekatan Kualitatif” oleh Abdussamad, pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan luaran berupa deskripsi data yang disusun dengan kata-kata baik berbentuk secara lisan maupun tulisan yang didapatkan melalui proses pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian (Abdussamad, 2021).

Kerangka Teoritis

Perkembangan studi Hubungan Internasional (HI) hingga saat ini akhirnya melahirkan perluasan dimensi isu dan aktor dalam kajian HI. Kini aktor sebagai objek studi HI tidak lagi hanya dipahami sebagai hubungan antar negara (state), melainkan telah berkembang pula dengan berbagai macam aktor seperti korporasi internasional (MNC), organisasi internasional, bahkan hingga ke kelompok atau gerakan masyarakat sipil (Soetjipto, 2018).

Perkembangan dimensi aktor ini, khususnya pada dampak dari kelompok maupun gerakan masyarakat sipil sejatinya tidak bisa dilepaskan pula dari betapa pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu proses mobilisasi berbagai gerakan masyarakat sipil, utamanya dimulai pada menjelang tahun 2000an. Gerakan seperti Seattle WTO Protests (1999), Queer Bash Back! (2007), Occupy Wall Street (2011), dan Black Lives Matter (2020) menjadi beberapa gerakan protes yang proses mobilisasinya menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Van Aelst & Walgrave, 2002).

Kemajuan gerakan masyarakat sipil juga melahirkan apa yang selanjutnya disebut sebagai proses internasionalisasi. Proses internasionalisasi adalah terbentuknya struktur hubungan segitiga yang bersifat tarik menarik antara negara, aktor non-negara, dan institusi internasional, serta peluang yang dihasilkan oleh hal ini bagi para aktor untuk terlibat dalam aksi kolektif di berbagai tingkat sistem ini (Tarrow, 2005).

Proses internasionalisasi yang ditambah dengan masifnya perkembangan teknologi kemudian memungkinkan aktor politik yang awalnya bersifat domestik seperti partai politik, organisasi non-pemerintah, bahkan gerakan sosial untuk berkomunikasi dan membangun aliansi atau solidaritas yang bersifat lintas negara. Proses internasionalisasi gerakan masyarakat sipil biasanya dibentuk karena adanya common goals atau kepentingan kelompok atau individu yang terlibat dalam gerakan tersebut. Biasanya kepentingan yang dimaksud berkaitan dengan tuntutan atas hak-hak politik, ekonomi, dan sosial dari kelompok yang dianggap termarginalkan atau tertindas dalam struktur negara tersebut (Haq et al., 2021).

Sementara internasionalisasi dikenali sebagai proses bagaimana sebuah gerakan yang bersifat lokal berinteraksi atau terpengaruhi oleh aktor-aktor internasional lainnya, para aktor atau subjek gerakan sosial yang melakukan proses internasionalisasi ini dikenal sebagai *transnational advocacy networks* (TAN) (Shawki, 2010). Dalam *Activist Beyond Borders* (1999), Keck & Sikkink mendefinisikan *Transnational Advocacy Networks* (TAN) sebagai sekumpulan aktor dengan kesamaan nilai, norma, dan diskursus yang saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerjasama pada isu-isu yang berdimensi internasional. Selanjutnya Keck dan Sikkink berargumen bahwa jaringan advokasi dapat berperan secara sangat signifikan terhadap proses politik dan perubahan kebijakan baik dalam level transnasional, regional, maupun domestik (Keck & Sikkink, 2014).

Hal ini dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan. Pertama, jaringan advokasi dianggap dapat menjadi *melting pot* bagi proses integrasi antara norma dan budaya domestik dengan kelompok transnasional. Kedua, jaringan advokasi juga dapat menjadi sarana temu bagi aktor-aktor hubungan internasional seperti kelompok masyarakat sipil, media, negara, dan organisasi internasional. Pertemuan ini dapat memungkinkan adanya dialog, tekanan, solidaritas, dan masuknya sumber daya internasional kepada kelompok domestik untuk memperjuangkan visi politiknya seperti hak asasi manusia, kebebasan individu, dan demokrasi (Keck & Sikkink, 2014).

Lebih lanjut, Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa jejaring advokasi ini biasanya akan dapat muncul dalam tiga keadaan. Pertama, ketika saluran perjuangan isu kelompok domestik dengan negara telah buntu, sehingga advokasi domestik menjadi sulit atau tidak efektif. Kedua, ketika aktor-aktor advokasi menyadari bahwa membangun jejaring transnasional akan membantu menyebarkan misi mereka dan meraih popularitas. Ketiga, ketika aktor-aktor advokasi berada dalam forum seperti konferensi internasional dimana mereka dapat berdiskusi dan mengkampanyekan kepentingan dan misi mereka (Keck & Sikkink, 2014).

Terakhir, *Transnational Advocacy Networks* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana jejaringan advokasi global menjadi penting bagi aktor advokasi domestik dalam mendorong isu yang mereka perjuangkan. Konsep ini dikenal sebagai *boomerang pattern*, sebuah proses dimana kelompok advokasi menghadapi kebuntuan dalam proses advokasinya dari negara, sehingga kelompok advokasi akan menggunakan kontak internasionalnya untuk memperkuat tuntutan mereka misalnya melalui tekanan, protes, dan solidaritas internasional sehingga memungkinkan kembali terbukanya ruang advokasi dan memenangkan tuntutan mereka (Keck & Sikkink, 2014).

Dalam mencapai keberhasilan yang hendak dicapai melalui strategi dan metode yang telah disebutkan diatas, *transnational advocacy networks* mencapainya melalui rangkaian taktik yang dikategorikan oleh Keck & Sikkink sebagai 4 tipologi taktik. Tipologi taktik yang dimaksud adalah:

1. Politik Informasi

Politik informasi merupakan sebuah taktik atau strategi untuk mengumpulkan dan kemudian mengolah informasi secara cepat, tepat, dan efektif sehingga dapat digunakan secara politik untuk menghasilkan dampak yang signifikan. Dalam bentuk praktiknya, taktik ini dapat diidentifikasi melalui pengamatan terhadap informasi atau data pendukung yang digunakan sebagai basis argumen terhadap suatu isu yang didorong oleh sebuah kelompok (Keck & Sikkink, 1999).

2. Politik Simbolik

Politik simbolik merupakan proses penggunaan simbol-simbol berupa kisah, cerita, narasi, hingga seni baik rupa maupun suara dengan tujuan untuk memperjelas isu yang tengah diadvokasikan atau mendapatkan momentum dalam titik jenuh proses advokasi. Peranan politik simbolik sendiri dianggap cukup penting karena massa yang mengambang atau belum terpapar oleh isu yang tengah diadvokasi cenderung lebih mudah mengingat dan bersimpati terhadap sebuah isu, informasi, atau peristiwa melalui simbolisasi. Simbolisasi juga diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan jaringan yang lebih luas (Keck & Sikkink, 1999).

3. Politik Pengaruh

Politik pengaruh adalah sebuah taktik dimana para aktivis atau gerakan sosial berupaya untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada aktor pembuat kebijakan melalui mobilisasi dan pengumpulan dukungan dari kelompok dan aktor lain yang dianggap lebih besar atau lebih mampu memberi tekanan. Dalam praktiknya, taktik politik pengaruh akan memperkuat posisi sebuah kelompok dalam proses negosiasi dan lobi-lobi politik sehingga memperbesar peluang bagi kelompok tersebut untuk memenangkan tuntutan mereka (Keck & Sikkink, 1999).

4. Politik Akuntabilitas

Politik akuntabilitas merupakan taktik terakhir yang merupakan tahap akhir dari keseluruhan taktik yang digunakan. Taktik ini hanya memungkinkan digunakan jika kelompok atau gerakan sosial telah berhasil menekan aktor pembuat kebijakan untuk memberikan komitmen atau kesepakatan terkait tuntutan yang diadvokasikan. Dalam politik akuntabilitas, gerakan sosial berperan untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap aktor pembuat kebijakan selama proses pembuatan kebijakan dengan tujuan memastikan aktor pembuat kebijakan memenuhi komitmen atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam penelitian ini, konsep *transnational advocacy networks* (TAN) digunakan sebagai alat analisis untuk memahami peranan gerakan Ni Una Menos dalam mendorong legalisasi aborsi di Argentina pada periode tahun 2015 hingga 2020. Proses analisis ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi 4 tipologi taktik Keck & Sikkink untuk dapat menemukan pengaruh peranan gerakan Ni Una Menos dalam membentuk dan mengubah diskursus dan simpati masyarakat Argentina terhadap aborsi yang pada akhirnya mengarah pada perubahan kebijakan terkait aborsi di Argentina pada 2020. Melalui analisis ini, diharapkan peneliti dapat menemukan dan mengidentifikasi peranan Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* (TAN) dalam proses perubahan kebijakan terkait aborsi di Argentina.

Pembahasan

Isu Aborsi dalam Lingkup Politik dan Sosial di Argentina

Isu hak atas aborsi, sama seperti berbagai isu kekerasan berbasis gender lainnya di Argentina, telah lama menjadi isu yang terabaikan dan tidak tersentuh dalam lanskap perpolitikan Argentina. Sebelum kemunculan Ni Una Menos pada pertengahan 2015, berbagai upaya dekriminialisasi aborsi yang dilakukan oleh banyak gerakan sosial dan masyarakat di Argentina belum menemui kemajuan yang signifikan. Hal ini tentu tidak mengherankan mengingat Argentina merupakan negara yang sangat konservatif, dimana lebih dari 60% penduduknya mengaku sebagai Katolik dan 15% sisanya mengaku sebagai Kristen evangelis,

isu aborsi jelas menjadi sebuah isu yang sensitif dan tidak populis sehingga tidak menguntungkan para politisi (Htun, 2003). Kedua kelompok agama yang menjadi mayoritas agama bagi penduduk Argentina ini memiliki posisi yang cukup tegas dalam menentang aborsi karena dilihat sebagai tindakan pembunuhan yang dikutuk dalam ajaran kekristenan.

Sebelum reformasi hukum hak atas aborsi pada tahun 2020, aborsi dikategorikan sebagai tindakan pidana dalam sistem Hukum Pidana Argentina. Dalam pasal 86 tahun 1921, tindakan aborsi disebut sebagai *Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo* atau Pengakhiran terhadap Kehamilan secara Sengaja. Sebagai konsekuensinya aborsi dilihat sebagai bentuk pembunuhan yang dikategorisasikan sebagai tindakan kriminal. Meskipun begitu, terdapat pengecualian dimana tindakan aborsi dianggap legal, yaitu pada kasus kehamilan yang dianggap oleh tenaga medis dapat membahayakan kehidupan ibu atau jika kehamilan tersebut merupakan akibat pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas mental. Dua pengecualian ini dianggap membatasi dan dalam praktiknya nyaris tidak pernah dapat digunakan. Hal ini menjadikan aborsi sebagai tindakan terlarang yang dapat mengancam pihak yang melakukan, pihak membantu, dan pihak yang dianggap melindungi atau menutupi tindakan aborsi (Human Rights Watch, 2005).

Sebagai konsekuensinya, praktik tindakan aborsi ilegal dan tidak aman terjadi begitu merajalela. Berbagai kondisi menjadi dasar bagi banyak perempuan di Argentina dalam melakukan aborsi, mulai dari akibat tindakan pemerkosaan, menjaga jarak kelahiran, ketidaksiapan baik ekonomi, fisik, maupun mental, hingga ketiadaan dukungan dari pasangan maupun keluarga. Pada akhir tahun 1980an, tercatat terdapat lebih dari 400.000 kasus tindakan aborsi ilegal dengan berbagai metode yang beresiko pertahunnya (Ramos et al., 2014). Metode-metode yang digunakan antara lain adalah melalui penggunaan obat-obatan herbal yang didapatkan dari dukun, obat medis ilegal yang digunakan tanpa resep dokter, hingga tindakan fisik paksa seperti kuret dan penarikan menggunakan selang kateter atau gantungan baju (Paxman et al., 1993).

Tindakan-tindakan aborsi tidak aman ini mengakibatkan tingginya angka kematian perempuan selama proses aborsi. Angka kematian perempuan akibat tindakan aborsi ilegal dan tidak aman ini menyentuh hingga angka 35% (Paxman et al., 1993). Obsesi pemerintah atas kontrol terhadap tubuh dan reproduksi perempuan Argentina diperparah pula dengan penerbitan Dekrit 659 dan Dekrit 3983 oleh Presiden Isabel Peron pada tahun 1974. Kedua dekrit ini menyatakan pelarangan terhadap praktik keluarga berencana melalui kontrol kelahiran menggunakan alat kontrasepsi. Dekrit ini dianggap oleh banyak peneliti dan aktivis sebagai pemicu utama melonjaknya tindakan aborsi ilegal dan tidak aman di Argentina (Bellucci, 1997).

Semua kebijakan di Argentina, utamanya yang berkaitan dengan moralitas dan norma sosial berasal dari kuatnya pengaruh Gereja Katolik dalam lanskap sosial dan politik di Argentina. Gereja Katolik dianggap sebagai otoritas tunggal dalam menentukan baik dan buruk sehingga setiap kebijakan publik diharuskan didasarkan pada nilai-nilai Katolik guna menciptakan kebaikan bersama. Begitu pula dengan kebijakan terkait pelarangan terhadap akses aborsi. Pelarangan ini didasarkan pada penolakan kuat Gereja Katolik terhadap aborsi yang dianggap setara dengan pembunuhan dalam Kitab Keluaran 2: 22-25 (Vallely, 2015).

Secara politik, Argentina pra-demokratisasi pada 1983 merupakan negara junta militer otoritarian dan kerap dianggap pula sebagai negara teokratik berbasis Katolik. Sepanjang abad 20, Argentina diguncang oleh berbagai kudeta dan peralihan kekuasaan yang dimotori oleh pihak militer. Meski mengalami beberapa kudeta, keseluruhan kudeta ini memiliki pola yang sama, yaitu besarnya pengaruh militer dan Gereja Katolik (Young, 2015). Karena lanskap politik yang begitu otoriter ini, gerakan sosial khususnya gerakan perempuan nyaris tidak memiliki ruang yang leluasa untuk menyuarakan tuntutan. Pada periode yang disebut sebagai *The Dirty War* 1976, rezim junta militer menculik dan menghilangkan lebih dari 35.000 penduduk Argentina yang dianggap sebagai komunis. Meski secara spesifik menargetkan para komunis, pada kenyataannya, para korban penculikan ini justru berasal dari masyarakat sipil biasa, bahkan jurnalis, aktivis, pengacara publik, hingga pemuka agama yang dianggap kritis atau melawan negara (Brown, 2011).

Momen kritis ini kemudian mengakibatkan kemarahan para perempuan yang merupakan ibu dari beberapa korban penghilangan massal. Sebuah protes yang dimulai oleh 14 perempuan, berubah menjadi gerakan besar yang menuntut demokratisasi dan pengadilan terhadap presiden dan militer yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM. Gerakan besar yang disebut sebagai *Madres de Plaza de Mayo* ini kemudian menjadi motor penggerak proses demokratisasi Argentina hingga berhasil menggulingkan rezim junta militer Argentina pada 1983 (Ludong et al., 2019).

Periode demokratisasi ini membuka pula ruang gerakan sosial serta menurunnya pengaruh Gereja Katolik dalam proses perpolitikan Argentina. Proses pencabutan larangan perceraian pada 1987 dianggap sebagai salah satu pertanda berkurangnya pengaruh Gereja Katolik dalam lanskap politik Argentina. Meskipun begitu, isu aborsi masih tetap menjadi hal yang tabu dan tak tersentuh dalam proses perpolitikan Argentina (Blofield, 2013). Ketidakstabilan perekonomian pasca reformasi mengalihkan fokus pemerintah dan rakyat Argentina pada isu-isu ekonomi seperti kemiskinan, inflasi, dan tingginya angka pengangguran. Krisis ekonomi Argentina 2001 menjadikan isu aborsi dan hak kesehatan seksual dan reproduksi semakin tidak tersentuh dalam lanskap perpolitikan Argentina (Feinberg et al., 2006).

Krisis ekonomi 2001 berakhir pada tahun 2003, ketika tingkat perekonomian Argentina mulai membaik dengan penurunan inflasi dan angka pengangguran. Pemilu demokratis kembali diselenggarakan pada 2003 dan dimenangkan oleh Nestor Kirchner yang dianggap sebagai seorang tokoh kiri progresif. Kemenangan Kirchner dianggap membuka lebar ruang gerakan sosial dan memajukan perjuangan hak atas aborsi. Kirchner mencoba melakukan proses reformasi terhadap pasal 86 tahun 1921 Hukum Pidana Argentina. Pada 2004, di bawah kepemimpinannya, Argentina untuk pertama kalinya meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), termasuk bagian mengenai hak reproduksi yang memasukan hak atas aborsi di dalamnya. Hal ini meningkatkan ketegangan antara pemerintahannya dengan Gereja Katolik yang ditandai berbagai macam demonstrasi dan kecaman terbuka dari Gereja Katolik maupun organisasi-organisasi yang menyatakan diri sebagai penjaga nilai Katolik (Gudiño Bessone, 2020).

Kirchner memberikan posisi yang cukup vital, untuk pertama kalinya dalam sejarah Argentina kepada beberapa aktivis pro-aborsi. Gines Gonzalez Garcia, seorang dokter sekaligus aktivis pro-aborsi yang cukup vokal dilantik oleh Kirchner sebagai Menteri

Kesehatan. Sebagai seorang pendukung akses atas aborsi dan kesetaraan gender, Gonzalez kemudian membuka akses pembatasan terhadap aborsi dengan mengizinkan tindakan aborsi untuk dilakukan dalam setiap kasus kehamilan akibat tindakan pemerkosaan serta kehamilan pada perempuan dibawah usia 13 tahun tanpa harus meminta izin dari orang tua maupun pasangan. (Gudiño Bessone, 2020)

Kepemimpinan progresif Kirchner dilanjutkan oleh istrinya, Cristina Kirchner yang memenangkan Pemilihan Umum Argentina 2007. Cristina merupakan sosok politisi yang sangat progresif di lansekap politik Argentina. Cristina melanjutkan kebijakan-kebijakan progresif yang dibuat suaminya di kepemimpinan sebelumnya. Dibawah Cristina, Argentina menjadi negara Amerika Latin pertama yang melegalisasi pernikahan sesama jenis pada 2010 yang diikuti dengan pemberian izin praktik adopsi maupun mother surrogate oleh pasangan sesama jenis. Cristina juga membantu penerbitan Undang-Undang Identitas Gender 2012, yang memberi pengakuan terhadap kelompok transgender secara progresif, dimana negara mengakui terapi penggantian hormon (HRT) dan operasi penggantian kelamin bagi individu diatas usia 18 tahun sebagai prosedur medis yang dapat ditanggung oleh jaminan kesehatan negara. Cristina juga melantik Carmen Argibay, seorang aktivis feminis pro-aborsi, ateis, dan liberal yang begitu dimusuhi oleh Gereja Katolik Argentina sebagai salah satu pimpinan Mahkamah Agung Argentina (Mulinari, 2023).

Agenda-agenda progresif yang banyak dimajukan selama kepemimpinan Nestor dan Cristina Kirchner harus berakhir pada 2015, usai Mauricio Macri memenangkan Pemilihan Umum Argentina 2015. Macri merupakan seorang pebisnis kontroversial sekaligus pemimpin partai populis kanan, Propuesta Republicana. Macri dan partainya telah menjadi oposisi keras terhadap berbagai kebijakan progresif yang dimulai pada era Nestor Kirchner. Dengan menggunakan retorika-retorika anti-feminis dan nilai budaya Katolik, Macri mendeklarasikan perang terbuka terhadap feminisme di negara tersebut (Mulinari, 2023).

Macri dengan segera kehilangan popularitas karena dianggap gagal memperbaiki perekonomian Argentina, dan bahkan memperburuknya. Macri terus menerus menggunakan retorika anti-feminis dan memicu perdebatan kontroversial khususnya terkait aborsi di parlemen ditengah memburuknya perekonomian Argentina. Kelompok oposisi progresif dengan cepat menyadari “pengalihan isu” yang digunakan oleh Macri untuk menutupi ketidakkampuannya. Ejekan *la cortina de humo* atau tabir asap segera menjadi populer untuk mengkritik Macri yang terus menerus membuat pengalihan isu dari berbagai macam masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kenaikan harga yang tidak mampu ia atasi (Mulinari, 2023).

Proses transisi kepemimpinan antara kediktatoran dan demokratik, hingga progresif dan konservatif yang terjadi secara berulang-ulang di Argentina menghadirkan dinamika tersendiri bagi gerakan perempuan di negara tersebut. Intervensi berlebih negara atas otonomi tubuh perempuan yang menjadi bagian kecil dari bentuk otoritarianisme pemerintahan junta militer di Argentina yang terlibat dalam berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pada periode junta militer, gerakan perempuan menjadi salah satu tulang punggung gerakan anti-junta dalam mendorong demokrasi dan perlindungan HAM. Transisi demokrasi pada 1983 menjadi awal pembuka bagi gerakan perempuan Argentina dalam mendorong isu legalisasi aborsi (Jost-Creegan, 2017).

Proses sekularisasi yang mengiringi demokratisasi Argentina membuka kesempatan bagi berkembangnya gerakan perempuan di Argentina. Memudarnya pengaruh gereja Katolik, meski masih cukup kuat, membuka pintu bagi proses perkembangan gerakan perempuan di negara tersebut. Kemenangan kandidat-kandidat presiden dari spektrum kiri-tengah sejak proses demokratisasi mengendurkan cengkeraman gereja Katolik yang begitu dalam di lembaga-lembaga politik Argentina. Pencabutan larangan perceraian pada tahun 1987, dan penerbitan berbagai kebijakan progresif mengenai keragaman gender dan seksualitas pada 2012 menunjukkan semakin berkurangnya peranan gereja Katolik di otoritas pembuat kebijakan (Daby & Moseley, 2022).

Meski begitu, isu legalisasi aborsi belum menjadi salah satu tuntutan atau slogan utama gerakan feminis di Argentina. Tetapi proses pemunculan isu legalisasi aborsi secara spesifik dimulai pada 2005 dengan terbentuknya Aliansi La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aliansi ini menjadi sebuah ruang kolektif bagi berbagai kelompok feminis yang bersimpati terhadap legalisasi aborsi dan secara spesifik berjuang untuk tuntutan legalisasi aborsi. Sejak 2007, Aliansi ini menerbitkan kertas rumusan kebijakan Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Proyek Penghentian Kehamilan Sukarela) yang merupakan hasil kajian ilmiah Aliansi untuk didorong sebagai kebijakan publik kepada parlemen. Aliansi tercatat telah mengajukan kertas rumusan kebijakan ini sebanyak enam kali ke parlemen sejak 2007, dan baru berhasil di 2018. Rumusan kebijakan ini menjadi bahan diskusi keras di parlemen dan berakhir dengan kegagalan (Teichert, 2023).

Meski gagal meraih legalisasi, kegagalan di Parlemen pada 2018 ini justru dilihat sebagai kemenangan oleh berbagai feminis di Argentina. Hal ini karena untuk pertama kalinya tuntutan aborsi berhasil masuk ke parlemen, dan berhasil mempopulerkan tuntutan legalisasi aborsi di masyarakat Argentina. Kegagalan ini justru selanjutnya memperkuat resonansi isu sekaligus memperkuat basis dukungan terhadap Aliansi dan isu legalisasi aborsi. Menanggapi kegagalan ini, Aliansi melakukan konsolidasi ulang dan memperkuat basis massa melalui serangkaian kampanye publik yang memperkuat tuntutan massa kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang mendekriminalisasi dan memberikan akses aborsi yang legal, aman, dan inklusif.

Ni Una Menos Menjembatani Feminisme, Aborsi, dan Keadilan Sosial

Pada 2015, publik Argentina diramaikan oleh kasus pembunuhan Chiara Paez, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang tewas saat mencoba menggugurkan kandungannya secara diam-diam bersama pacarnya. Kematian Paez segera menjadi katalisator kemarahan publik Argentina. Sebagai salah satu negara dengan angka femisida tertinggi di dunia, dimana satu perempuan dibunuh oleh laki-laki setiap 36 jam di Argentina. Pembunuhan Paez telah menjadi puncak gunung es dari fenomena femisida yang berakar dari kultur machismo masyarakat Amerika Latin (Belotti et al., 2021).

Marcela Ojeda, seorang aktivis feminis dan jurnalis memulai sebuah protes online dengan tagar slogan Ni Una Menos. Slogan ini sendiri bukan lah slogan baru, Ojeda menyatakan bahwa ia menyadur baris puisi sastrawan feminis Argentina, Susana Chaves Castillo, "*Ni una mujer menos, Ni una muerta mas*" yang berarti "tidak ada satupun perempuan yang ditinggalkan, tidak ada satu pun yang mati lagi." Hanya dalam hitungan hari, tagar Ni Una Menos berubah dari gerakan online menjadi demonstrasi besar di Plaza de Mayo, tempat

bersejarah bagi gerakan perempuan pertama di Argentina, yang dihadiri lebih dari 300.000 peserta dari berbagai golongan kelompok dan identitas. Demonstrasi ini pun menjadi demonstrasi tahunan yang menjadi momen mobilisasi massa dan pengartikulasian situasi (Chenou & Cepeda-Másmela, 2019).

Melalui serangkaian demonstrasi publik, Ni Una Menos berhasil menyatukan berbagai organisasi dan gerakan feminis di Argentina. Lebih dari sekedar slogan, Ni Una Menos menjadi sebuah identitas kolektif bagi gerakan perempuan bukan hanya di Argentina, melainkan Amerika Latin. Identitas kolektif yang terbentuk adalah kemarahan terhadap kultur machismo dan femisida, sebuah bentuk pembunuhan terhadap perempuan karena identitasnya sebagai perempuan (Belotti et al., 2021).

Ni Una Menos kemudian dengan segera melakukan interseksionalisasi gerakan dengan melihat bahwa femisida bukanlah isu tunggal, melainkan kumpulan masalah yang berakar dari kultur machismo di Amerika Latin. (Oviya, 2020) Dengan taktik jalanan, Ni Una Menos mengubah metode gerakan perempuan di Argentina yang sebelumnya bersifat anti kekerasan, mengandalkan lobi dengan partai politik kiri, serta berorientasi parlemen. Segera setelah itu, Ni Una Menos secara konsisten melakukan berbagai mobilisasi dan pertemuan di berbagai level dan daerah. Bukan hanya di Argentina, panggilan mobilisasi yang dilakukan oleh Ni Una Menos juga dengan segera bergema ke negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Peru, Chile, Meksiko, dan Puerto Rico (Panico, 2018).

Pada demonstrasi di awal tahun 2017, Ni Una Menos mulai memasukan diskursus hak aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang secara otomatis memposisikan hak atas aborsi sebagai hak asasi manusia. Momen ini merupakan pintu pembuka bagi gerakan perempuan Argentina dimana untuk pertama kalinya isu aborsi dapat dikampanyekan secara terbuka di ruang publik. Tuntutan ini juga menandai perjuangan Ni Una Menos untuk memisahkan negara dan gereja atau sekulerisme secara total dalam lanskap politik Argentina (Politi & Londoño, 2021).

Melalui penyatuan berbagai kelompok dan organisasi feminis dari seluruh Argentina, Ni Una Menos berhasil memberikan tekanan kepada Parlemen Argentina untuk menerima kertas rumusan kebijakan Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Kuatnya tekanan massa selanjutnya memaksa Parlemen untuk kemudian menerima rancangan undang-undang ini sebagai program legislasi Parlemen Argentina tahun 2018. Untuk pertama kalinya, rancangan undang-undang pro-aborsi masuk ke Parlemen Argentina (Teichert, 2023). Meski dengan kuatnya tekanan, RUU ini kemudian digagalkan oleh Parlemen di level Senat. Dimana dimana 38 anggota senat menolak legalisasi aborsi berbanding 31 yang mendukung. RUU ini juga kurang mendapat dukungan dari Presiden saat itu, Mauricio Macri (BBC.com, 2018).

Meski gagal dengan kekalahan tipis, dimana 38 anggota senat menolak legalisasi aborsi berbanding 31 yang mendukung. Ni Una Menos melihat kegagalan di level legislasi ini sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda. Optimisme ini bukannya tanpa alasan, mengingat keberadaan aktif Ni Una Menos dalam mengorganisir pemogokan dan mobilisasi massa untuk mendorong isu aborsi dalam kerangka hak asasi manusia sejak 2017 berhasil meningkatkan simpati publik terhadap isu aborsi. Dengan didukung oleh data yang dihimpun America's Barometer selama 2012-2019, ditemukan perubahan keterlibatan perempuan Argentina dalam gerakan sosial politik, dimana terjadi peningkatan telah meningkat drastis sejak kemunculan

Ni Una Menos yang diikuti dengan perubahan opini publik menjadi semakin positif terhadap aborsi (Taylor et al., 2021).

Ni Una Menos berhasil membangun interseksi dari berbagai isu yang menjadi fokus dari banyak gerakan perempuan Argentina. Mulai dari hak masyarakat adat, kelompok LGBTIQ+, hingga serikat pekerja. Ni Una Menos membingkai gerakan legalisasi aborsi sebagai gerakan perjuangan bersama untuk membebaskan semua perempuan dari berbagai lapisan penindasan (Varela, 2018). Hal ini dilakukan dengan penggunaan identitas kolektif perjuangan melawan femisida, dimana aborsi bawah tanah menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi perempuan di Argentina. Narasi yang dibangun kemudian adalah ilegalisasi akses atas aborsi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk femisida yang dilakukan secara sistematis oleh negara (Buedo, 2020).

Proses pembangunan interseksi atas isu legalisasi aborsi ini dilakukan misalnya dengan narasi bahwa pelarangan aborsi akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan dari kelas pekerja yang lebih miskin dan tidak mampu mengakses metode aborsi yang lebih layak, sehingga membuat mereka rentan mengakses aborsi yang tidak aman. Pelarangan aborsi juga membuat individu-individu non cis-women seperti transgender laki-laki dan gender non-biner tidak dapat melakukan aborsi karena hambatan hukum maupun budaya. Pelarangan aborsi juga dipandang akan menempatkan masyarakat adat dalam posisi rentan karena mereka belum mengenal kontrasepsi dan sulit mengakses lembaga medis (Morgenstern, 2012).

Maka proses interseksionalisasi isu dalam mendorong advokasi legalisasi aborsi yang dilakukan oleh Ni Una Menos ini kemudian berperan sangat penting dalam proses penciptaan basis ideasional gerakan. Meski berangkat dari paradigma lokal, basis ideasional sebagai korban femisida yang diakibatkan oleh kekerasan negara dan kultur *machismo* ini sejatinya memiliki resonansi dengan kondisi perempuan di kawasan Amerika Latin. Maka penciptaan basis ideasional yang muncul melalui proses interseksionalisasi ini tidak bisa serta merta dianggap sebagai sesuatu yang bersifat lokal, karena fenomena ini terjadi nyaris di seluruh negara Amerika Latin yang memiliki kultur *machismo*.

Pertarungan ide akibat perbedaan basis ideasional di kawasan Amerika Latin antara dua kutub yang bertentangan, yaitu *pro-choice* yang lekat dengan gerakan perempuan melawan *pro-life* yang dekat dengan kelompok religius harus dipandang sebagai salah satu dinamika dalam proses penciptaan pengaturan narasi yang kemudian melahirkan interseksionalisasi isu aborsi melalui kerangka femisida. Hal ini kemudian memposisikan situasi pertarungan ide ini sebagai proses pertarungan antara kubu progresif yang membela kepentingan rakyat melawan kubu konservatif yang membela status quo dan kepentingan elit atas tubuh rakyat.

Peranan Ni Una Menos Sebagai *Transnational Advocacy Networks* dalam Mendorong Legalisasi Aborsi di Argentina

Proses advokasi merupakan sebuah proses dimana sekelompok orang melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan di institusi politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks studi Hubungan Internasional, proses advokasi menawarkan perubahan paradigma baru bagi studi Hubungan Internasional. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari yang sebelumnya bersifat *state-centered* menjadi lebih dinamis dengan diakuinya kemampuan aktor-aktor non-negara untuk

mempengaruhi kebijakan sebuah negara melalui proses advokasi (Soetjipto, 2018). Keck dan Sikkink kemudian mengembangkan pemahaman ini dengan konsep yang dikenal sebagai *Transnational Advocacy Networks* (TAN) (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam *Activist Beyond Borders* (1999), Keck & Sikkink mendefinisikan *Transnational Advocacy Networks* (TAN) sebagai sekumpulan aktor dengan kesamaan nilai, norma, dan diskursus yang saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerjasama pada isu-isu yang berdimensi internasional. (Keck & Sikkink, 1999) Selanjutnya Keck dan Sikkink berargumen bahwa jaringan advokasi dapat berperan secara sangat signifikan terhadap proses politik dan perubahan kebijakan baik dalam level transnasional, regional, maupun domestik. Hal ini dilakukan dengan proses pertukaran pengaruh melalui pembangunan relasi dengan berbagai macam kelompok lain di luar negara asal yang memiliki kesamaan kepentingan. (Keck & Sikkink, 2014)

Dalam mencapai keberhasilan yang hendak dicapai melalui strategi dan metode yang telah disebutkan diatas, *transnational advocacy networks* mencapainya melalui rangkaian taktik yang dikategorikan oleh Keck dan Sikkink sebagai tipologi taktik. Tipologi taktik yang dimaksud mencakupi, pertama politik informasi, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi secara cepat dan efektif. Kedua, politik simbolik, yaitu proses pembuatan simbol atau *symbolization* yang bisa berupa warna, slogan, hingga nama yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, politik pengaruh dimana para aktivis atau gerakan sosial berupaya untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada aktor pembuat kebijakan melalui mobilisasi dan pengumpulan dukungan dari kelompok dan aktor lain yang dianggap lebih besar atau lebih mampu memberi tekanan. Terakhir, politik akuntabilitas, yaitu proses pengawasan terhadap aktor pembuat kebijakan untuk menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang telah disepakati (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam konteks menjelaskan Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* dalam proses upaya legalisasi aborsi di Argentina. Empat tipologi taktik yang telah disebutkan akan digunakan untuk menganalisis taktik yang digunakan Ni Una Menos dalam mendorong legalisasi aborsi sejak kemunculannya pada 2015, hingga pada legalisasi aborsi pada 2020. Dimulai dari politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, hingga yang terakhir politik akuntabilitas.

Informasi dalam gerakan sosial baik yang bersifat transnasional maupun lokal memiliki peranan yang sangat vital. Dalam konteks sebagai *transnational advocacy networks*, informasi berperan penting sebagai pembuka bagi gerakan untuk kemudian mencapai politik pengaruh. Informasi yang dimaksud disini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk membuktikan sebuah fenomena sebagai hal yang nyata. Hal ini dapat berupa kesaksian, data, hingga cerita dari mereka yang terdampak sebuah masalah. Proses politik informasi dimulai dengan pengumpulan informasi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengamatan dan pencatatan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan informasi dan distribusi informasi sehingga dapat menarik simpati publik dan mengajak publik untuk mengambil tindakan (Keck & Sikkink, 1999).

Proses identifikasi tipologi taktik menjadi sangat vital dalam proses identifikasi sebuah *transnational advocacy networks*. Politik informasi merupakan proses dan kemampuan dari sebuah kelompok atau gerakan sosial untuk melakukan pengumpulan informasi yang

dilanjutkan dengan pengolahan informasi yang didapatkan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat digunakan secara politik untuk menghasilkan dampak yang signifikan. (Keck & Sikkink, 1999) Dalam konteks Ni Una Menos, politik informasi dapat diamati dari proses kemunculan isu yang kemudian dikembangkan menjadi kampanye digital serta pengorganisasian massa.

Ni Una Menos lahir sebagai sebuah reaksi terhadap kematian Chiara Paez, seorang perempuan berusia 14 tahun yang jasadnya ditemukan terkubur di halaman belakang rumah kekasihnya. Paez meninggal secara mengenaskan karena kekerasan dari pacarnya serta efek dari proses aborsi yang dilakukan menggunakan obat-obatan ilegal. Kematian Paez menjadi puncak gunung es dari tingginya kasus femisida di Argentina dan memicu kemarahan publik. Dimulai dari cuitan Twitter Marcela Ojeda, seorang aktivis feminis dan jurnalis, kemarahan publik berubah menjadi gelombang protes massal yang menuntut agar tidak ada lagi perempuan yang harus terbunuh karena kekerasan berbasis gender (Belotti et al., 2021).

Media sosial khususnya Twitter memainkan peranan yang sangat besar dalam proses kemunculan Ni Una Menos. Media sosial juga berperan pula dalam penciptaan identitas kolektif sebagai perempuan Argentina yang harus terus hidup dalam ketakutan karena tingginya angka femisida dan kekerasan berbasis gender. Penyebaran informasi serta penciptaan identitas kolektif ini kemudian berhasil mengumpulkan simpati serta menumbuhkan kesadaran mengenai arti menjadi seorang perempuan di tengah kultur machismo masyarakat Amerika Latin. Proses ini menjadi penting karena kesamaan kemarahan serta identitas kolektif yang terbentuk berperan sangat penting dalam pengorganisasian Ni Una Menos sebagai gerakan feminis akar rumput (Oviya, 2020).

Cuitan Twitter Marcela Ojeda berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Argentina mengenai kekerasan berbasis gender. Cuitan dengan tagar #NiUnaMenos kemudian menjadi trending topic dan diikuti oleh berbagai macam informasi yang mendukung proses pengkondisian isu. Informasi yang banyak dimunculkan adalah mengenai banyaknya kasus femisida dan kekerasan berbasis gender di Argentina, dan siapa saja dapat menjadi korbannya. Arah serangan kemudian bukan hanya kepada masyarakat yang terus melanggengkan kultur machismo tapi juga kepada pemerintah yang dianggap tidak kompeten dalam mencegah maupun menangani berbagai macam kasus kekerasan berbasis gender (Oviya, 2020).

Selain media sosial, pers juga memainkan peran sangat besar dalam proses politik informasi. Hal ini sejatinya bukan lah hal yang baru, Keck & Sikkink mengemukakan bahwa pers dapat menjadi salah satu aktor pendukung yang berperan sangat signifikan dalam proses advokasi. Sama seperti media sosial, pers berperan penting dalam penjangkauan audience yang lebih luas di luar jejaring yang telah dimiliki, bahkan hingga melampaui batas negara. Lebih lanjut, pers juga memiliki peran besar dalam mengemas informasi untuk menciptakan proses pengkondisian isu. (Keck & Sikkink, 1999)

Sejak 2017, tuntutan mengenai akses terhadap dekriminialisasi serta penyediaan akses terhadap aborsi aman mulai mengemuka. Pada demonstrasi 3 Juni 2017, secara resmi Ni Una Menos mengajukan tuntutan kepada negara untuk melakukan dekriminialisasi aborsi untuk membuka akses terhadap aborsi yang aman (Politi & Londoño, 2021).

Ni Una Menos membingkai aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang kemudian menempatkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dimungkinkan karena Ni Una Menos melakukan proses politik informasi, dimana ditemukan fakta bahwa aborsi klandestin menjadi salah satu penyebab utama kematian perempuan di Argentina yang mencapai puluhan ribu kasus tiap tahunnya. Sehingga pemerintah yang mengkriminalisasi tindakan aborsi melalui berbagai macam regulasi yang ada dipandang sebagai salah satu pihak yang harus bertanggungjawab atas kematian-kematian akibat aborsi klandestin (Politi & Londoño, 2021).

Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* melakukan politik informasi melalui penggunaan media sosial untuk menyebarkan isu mengenai kekerasan berbasis gender dan femisida. Dalam upaya melakukan internasionalisasi, cuitan Marcela Ojeda pada 15 Mei 2015 berhasil memantik dan menumbuhkan kesadaran serta solidaritas akan begitu pentingnya pembukaan akses terhadap layanan aborsi. Kesamaan kultur Latin juga mengakibatkan pesan serta protes terhadap kegagalan negara dalam menyediakan akses aborsi aman juga beresonansi bukan hanya terhadap masyarakat Argentina, tapi juga di beberapa negara Latin seperti Meksiko, Chile, Puerto Rico, dan Peru. Hal ini dimungkinkan karena kesamaan kultur *machismo* yang mengakar begitu kuat serta pengaruh Gereja Katolik yang besar baik di pemerintahan maupun masyarakat negara-negara tersebut (Oviya, 2020).

Selain media sosial, pers juga menjadi salah satu alat untuk melakukan politik informasi. Ni Una Menos berhasil menjadi magnet bagi media dari berbagai negara untuk meliput dan menyebarkan apa yang menjadi tuntutan dari gerakan. Beberapa media internasional ternama melakukan coverage terhadap aksi-aksi dan tuntutan Ni Una Menos sehingga membantu proses internasionalisasi Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks*. Beberapa diantaranya adalah Al Jazeera yang menerbitkan artikel berjudul “Argentina’s Ni Una Menos Turns Focus to Economic Crisis, Abortion”, Majalah Times dengan “Argentina Votes Today on Legalizing Abortion. Here’s What That Means for Women’s Rights Across Latin America”, dan NPR dalam artikel berjudul “How #NiUnaMenos grew from the streets of Argentina into a regional women's movement.”

Proses politik informasi yang sudah dilakukan Ni Una Menos kemudian berkembang menjadi penciptaan narasi serta identitas kolektif bersama. Narasi serta identitas kolektif ini kemudian menjadi strategi atau taktik bagi Ni Una Menos dalam menciptakan politik simbolik. Politik simbolik sendiri merupakan proses penciptaan dan penggunaan simbol-simbol yang dapat berupa kisah, cerita, narasi, hingga seni baik rupa maupun suara yang dimaksudkan untuk memperkuat artikulasi isu yang tengah diadvokasikan atau mendapatkan momentum dalam titik jenuh proses advokasi. Peranan politik simbolik sendiri dianggap cukup penting karena massa yang mengambang atau belum terpapar oleh isu yang tengah diadvokasi cenderung lebih mudah mengingat dan bersimpati terhadap sebuah isu, informasi, atau peristiwa melalui simbolisasi. Simbolisasi juga diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan jaringan yang lebih luas (Keck & Sikkink, 1999).

Nama Ni Una Menos sendiri sejatinya sudah merupakan bentuk praktik politik simbolik, dimana sebuah slogan yang berasal dari puisi sastrawan feminis Susana Chaves Castillo dan dicuitkan oleh jurnalis cum aktivis feminis Argentina Marcela Ojeda berubah menjadi sebuah panggilan untuk melawan kekerasan berbasis gender (Chenou & Cepeda-Másmela, 2019). Ni Una Menos kemudian mencoba menghubungkan gerakan mereka dengan

para pendahulu mereka, Madres de Plaza de Mayo, sekaligus mendapatkan legitimasi sebagai suksesor gerakan ini. Hal ini dilakukan dengan penggunaan rute demonstrasi tahunan mereka yang dilakukan dari Plaza de Mayo hingga ke gedung Kongres Nasional, rute yang sama yang digunakan Madres de Plaza de Mayo saat melawan kediktatoran junta militer (Gago, 2020).

Legitimasi Ni Una Menos sebagai suksesor Madres de Plaza de Mayo terjadi pada demonstrasi 3 Juni 2018. Pada demonstrasi yang dihadiri lebih dari 100 ribu peserta ini, salah satu pendiri Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortinas menghadiri demonstrasi sambil mengenakan slayer warna putih yang menjadi simbol gerakan Madres de Plaza de Mayo dan slayer hijau yang menjadi simbol Ni Una Menos dan gerakan legalisasi aborsi secara bersamaan. Dengan mendapatkan legitimasi sebagai suksesor gerakan paling dihormati di Argentina, Ni Una Menos berhasil mengamankan dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil sambil menjadikan aborsi sebagai isu populis (Sosa, 2021).

Sedari awal, Ni Una Menos menggunakan sapu tangan warna hijau atau *añuelos verdes* sebagai simbol identitas mereka. Pemilihan warna hijau sendiri dipilih karena hijau dianggap merepresentasikan alam, harapan, dan kehidupan. Melalui penggunaan warna hijau, Ni Una Menos kemudian membangun identitas kolektif sekaligus memperkuat dukungan dari berbagai kelompok (Hernandes, 2022). Aktivis Ni Una Menos kerap menggunakan atribut-atribut berwarna hijau yang mencolok sebagai simbol perlawanan mereka terhadap kultur konservatif dan menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari Ni Una Menos. Lebih lanjut, warna hijau kemudian menjadi penanda perspektif *pro-choice* bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil maupun politisi (Gago, 2020).

Internasionalisasi simbol hijau kemudian dimulai pada 2018, dimana gerakan Ni Una Menos lahir di Chile dengan tuntutan pembukaan akses terhadap layanan aborsi aman dan gratis secara menyeluruh dengan tuntutan “#NoBastan3Causales” atau “tiga alasan saja tidak cukup” yang merujuk pada KUHP Chile yang hanya mengizinkan aborsi dilakukan karena alasan kesehatan ibu, janin tidak sempurna, dan perkosaan. Dengan segera, atribut berwarna hijau menjadi simbol gerakan legalisasi aborsi di seluruh dunia. Di Amerika Latin sendiri, Ni Una Menos dan simbolisasi warna hijau dengan segera menyebar ke banyak negara Amerika Latin yang kemudian kerap disebut sebagai Green Wave (Sola-Santiago, 2022).

Melalui politik simbolik, Ni Una Menos berhasil mengartikulasikan identitas kolektifnya hingga melampaui batas negara. Proses politik simbolik inilah yang kemudian berperan besar dalam proses penciptaan jejaring regional yang menandai dimulainya proses internasionalisasi gerakan./ Ni Una Menos berhasil membangun kekuatan yang nantinya akan saling mendukung melalui model *boomerang pattern* dalam tipologi taktik politik pengaruh. Politik pengaruh sendiri terjadi melalui model yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai *boomerang pattern*, sebuah proses dimana ketika sebuah kelompok advokasi akan mengandalkan jejaring kontak internasional untuk memperkuat tekanan terhadap tuntutannya ketika menghadapi kebuntuan dalam proses advokasinya karena adanya hambatan dari negara. Hal ini dilakukan dengan beberapa taktik seperti melalui tekanan, protes, dan solidaritas internasional. Melalui taktik ini diharapkan negara mengendurkan hambatan yang diberikan terhadap aktor *transnational advocacy networks* sehingga memungkinkan kembali terbukanya ruang advokasi dan memenangkan tuntutannya (Keck & Sikkink, 2014).

Dalam konteks sebagai tipologi taktik, politik pengaruh dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengaruh moral dan pengaruh material. Pengaruh moral merupakan bentuk pengerahan dukungan dari jaringan advokasi untuk menjadikan negara target sebagai pusat perhatian internasional. Sedangkan pengaruh material merupakan upaya bentuk pengerahan dukungan yang bergantung pada alat kenegaraan seperti blokade ekonomi, militer, dan sanksi internasional (Keck & Sikkink, 1999).

Ni Una Menos sendiri mengembangkan jejaring politik pengaruh moral yang terbentuk melalui aksi massa serentak yang kerap disebut sebagai *green wave*. Pada kegagalan legalisasi aborsi tahun 2018, Ni Una Menos dengan segera melakukan konsolidasi baik dalam level lokal, nasional, maupun regional pasca kerusuhan besar-besaran di luar gedung Kongres Nasional. Pada level lokal dan nasional, Ni Una Menos melakukan penguatan internal melalui proses konsolidasi serta kampanye yang lebih massif dan merangkul lebih banyak elemen masyarakat sipil seperti serikat pekerja, aliansi masyarakat adat, dan gerakan LGBTIQ+ secara lebih massif. Dalam level internasional, Ni Una Menos mengirim seruan solidaritas internasional dan ditanggapi dengan berbagai macam demonstrasi feminis di negara-negara seperti Chile, Kolombia, dan Meksiko (Varela, 2018).

Di Meksiko, seruan ini ditanggapi secara massif di beberapa kota seperti Mexico City dan Guadalajara (Paley et al., 2023). Untuk memahami *boomerang pattern* dalam proses legalisasi aborsi oleh Ni Una Menos, timeframe yang digunakan adalah sejak 2015 hingga 2020. Hal ini karena proses perjuangan menuju legalisasi aborsi di Argentina bukanlah kerja semalam, melainkan proses pengorganisasian selama bertahun-tahun yang disertai dengan trial and errors. Kegagalan pada upaya legalisasi aborsi 2018 menghasilkan refleksi bahwa sebagai gerakan akar rumput, Ni Una Menos membutuhkan dukungan internasional guna memberikan tekanan kepada pemerintah Argentina yang menutup akses terhadap advokasi yang tengah diperjuangkan Ni Una Menos. Kegagalan upaya legalisasi pada 2018 juga dapat dilihat sebagai kemajuan besar karena untuk pertama kalinya isu legalisasi aborsi berhasil masuk ke ruang pembuat kebijakan (Varela, 2018).

Blokade utama yang dianggap paling menghambat dan kemudian menggagalkan legalisasi aborsi di Argentina adalah posisi Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik yang sekaligus warga negara Argentina (Caselli, 2018). Untuk menghadapi hambatan ini, Ni Una Menos menggalang dukungan internasional yang merupakan bentuk politik pengaruh dalam model pengaruh moral. Karena bersifat non-state, bentuk dukungan yang digalang kebanyakan didapatkan Ni Una Menos dari jejaring Ni Una Menos dari beberapa negara Latin, serikat pekerja serta berbagai non-government organization (NGO) seperti Amnesty International (Amnesty International, 2018).

Boomerang Pattern Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* dapat dilihat pada kebuntuan kondisi yang terjadi dengan digagalkannya upaya legalisasi aborsi pada 2018. Ni Una Menos dengan segera melakukan panggilan solidaritas internasional yang diharapkan dapat memberikan tekanan kepada otoritas Argentina. Melalui tekanan ini, Ni Una Menos kemudian melakukan konsolidasi ulang serta mengumpulkan momentum untuk melakukan tekanan balik saat hambatan dari negara dirasa sudah mengendur (Palmeiro, 2018).

Pada 2020, ketika Kongres Nasional Argentina kembali akan mengadakan pemungutan suara mengenai legalisasi aboris, Ni Una Menos dengan segera menerbitkan seruan solidaritas

internasional untuk legalisasi aborsi Argentina. Seruan ini kembali disambut oleh jaringan Ni Una Menos diberbagai negara yang mengadakan pemogokan perempuan untuk aborsi Argentina. Pemogokan ini terjadi di kota-kota besar di Meksiko, Chile, Bolivia, Kolombia, Brazil, dan Venezuela (Palmeiro, 2020). Proses pengorganisasian jejaring internasional dilakukan Ni Una Menos dengan penciptaan identitas kolektif serta semangat perjuangan menghadapi musuh yang sama melalui interseksionalisasi. Ni Una Menos melakukan konsolidasi dengan beberapa serikat pekerja Amerika Latin seperti The Confederation of Popular Economy Workers, Socialist Worker's Movement, dan Workers Left Front yang berbuah hasil dengan rentetan International Women Strike setiap bulan Maret pada tiap tahunnya (Langlois, 2020).

Melalui berbagai tekanan jejaringan internasional serta konsolidasi nasional yang lebih kuat, Ni Una Menos berhasil memberikan tekanan yang lebih kuat dalam proses legalisasi aborsi tahun 2020. Berbarengan dengan kemenangan Alberto Fernandez, kandidat partai kiri dalam Pemilu Argentina 2019, Ni Una Menos mendapatkan momentum untuk memberikan tekanan yang lebih kuat baik secara nasional maupun internasional dengan adanya pink tide atau kemenangan kandidat-kandidat feminis di Amerika Latin. Pada 1 Maret 2020, Fernandes merealisasikan janji kampanyenya untuk mendorong legalisasi aborsi di era kepemimpinannya (Anderson, 2022).

Namun, pandemi COVID-19 dengan segera menutupi prioritas kepemimpinan Fernandez dengan dalih kedaruratan nasional. Ni Una Menos dengan segera melakukan panggilan mobilisasi massa di tengah pandemi. Fernandez kemudian tertekan dan mengirimkan RUU legalisasi aborsi ke parlemen dan lolos pada Desember 2020. Ni Una Menos melakukan proses politik akuntabilitas dengan melakukan mobilisasi massa guna mengawal janji kampanye presiden baru dan melakukan koreksi begitu janji yang disepakati dilanggar. Karena besarnya tekanan massa serta ancaman memburuknya penyebaran COVID-19 karena mobilisasi massa, Presiden Fernandes kemudian dengan segera menyerang draf rancangan undang-undang kepada Parlemen Argentina.

Proses pemungutan suara oleh Senat dilakukan pada 29 Desember 2020. Buenos Aires dipenuhi oleh gelombang massa beratribut hijau. Tekanan internasional juga berdatangan misalnya Ni Una Menos melakukan aksi serentak di Meksiko, Chile, serta Kolombia guna bersolidaritas kepada Ni Una Menos Argentina yang tengah mendorong legalisasi aborsi (Palmeiro, 2020). Proses pemungutan suara berakhir dengan kemenangan kubu pro-aborsi, dimana 38 mendukung, 29 menentang, dan 1 abstain. Melalui penerbitan undang-undang baru ini, secara otomatis Hukum Pidana Aborsi 1921 menjadi tidak sah dan masyarakat Argentina dapat mengakses aborsi di fasilitas medis secara bebas dan tidak boleh dihambat (Misculin, 2020).

Kesimpulan

Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* dalam mendorong proses perubahan kebijakan legalisasi aborsi di Argentina berhasil memberikan dampak positif serta signifikan dalam proses perubahan kebijakan yang ada. Guna menganalisis dan kemudian mengidentifikasi bagaimana pengaruh Ni Una Menos dalam mendorong legalisasi aborsi di Argentina selama periode 2015-2020, peneliti menggunakan kerangka teori *transnational*

advocacy networks. Kerangka teori ini digunakan untuk mengidentifikasi proses pembentukan, strategi, hingga cara operasi Ni Una Menos sebagai sebuah gerakan feminis akar rumput.

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *Transnational advocacy Networks* diidentifikasi melalui penggunaan empat tipologi taktik. Tipologi taktik yang dimaksud adalah politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Melalui penggunaan empat tipologi taktik ini, penulis berhasil menyimpulkan bahwa Ni Una Menos merupakan sebuah *transnational advocacy networks* yang berhasil melakukan internasionalisasi dalam level regional Amerika Latin dan kemudian menjadi strategi pendobrak kebuntuan advokasi pasca kegagalan legalisasi aborsi 2018.

Adapun penjelasan mengenai masing-masing tipologi taktik, dimulai dari politik informasi. Ni Una Menos berhasil menggunakan media sosial, dalam kasus ini Twitter sebagai sarana untuk mengabarkan isu atau masalah yang terjadi. Tepat seperti analisis Keck dan Sikkink, Ni Una Menos juga menggunakan pers internasional sebagai sarana melakukan internasionalisasi. Kemunculan Ni Una Menos yang begitu masif dan militan menjadi magnet penarik bagi banyak media dan secara otomatis membantu kerja-kerja kampanye Ni Una Menos melewati batas negara.

Melalui politik informasi, Ni Una Menos kemudian mengolah informasi yang didapatkan menjadi strategi yang relevan dengan kondisi Argentina. Ni Una Menos melakukan politik simbolik dengan membingkai isu aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi, hal ini menempatkan negara dalam posisi sebagai aktor pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena mengkriminalisasi tindakan aborsi yang menjadikan tingginya angka aborsi ilegal yang meningkatkan resiko kematian perempuan.

Ni Una Menos juga menghubungkan gerakannya dengan gerakan Madres de Plaza de Mayo yang begitu dihormati. Ni Una Menos bukan hanya sukses melakukan politik simbolik dalam penyatuan slogan, identitas kolektif sebagai individu yang rawan menjadi korban kekerasan dalam kultur machismo masyarakat Amerika Latin, tetapi juga meraih legitimasi sebagai penerus salah satu gerakan paling dihormati di Argentina.

Meski berhasil meningkatkan partisipasi politik perempuan dan perubahan opini terhadap aborsi menjadi positif, Ni Una Menos gagal mendorong legalisasi aborsi 2018. Ni Una Menos kemudian menemukan bahwa mereka perlu memperkuat jejaring internasional guna memberikan tekanan karena mereka menghadapi hambatan yang sulit untuk dilawan sendirian. Melalui panggilan solidaritas internasional, Ni Una Menos berhasil memberikan tekanan tiap tahunnya melalui Pemogokan Perempuan Internasional setiap bulan Juni hingga 2020. Terpilihnya presiden dari koalisi kiri dan diiringi dengan gelombang Pink Tide, memberikan tekanan kepada presiden terpilih untuk segera merealisasikan tuntutan legalisasi aborsi.

Meski sudah berjanji untuk segera mendorong pengesahan RUU pro-aborsi, pandemi COVID-19 dengan segera mengalihkan fokus presiden Fernandez. Ni Una Menos dengan segera melakukan proses politik akuntabilitas. Politik akuntabilitas dilakukan dengan melakukan mobilisasi massa di tengah pandemi untuk memaksa presiden Fernandez kembali memprioritaskan RUU legalisasi aborsi. Proses pemungutan suara oleh Senat dilakukan pada 29 Desember 2020. Buenos Aires dipenuhi oleh gelombang massa beratribut hijau. Tekanan

internasional juga berdatangan misalnya Ni Una Menos melakukan aksi serentak di Meksiko, Chile, serta Kolombia guna bersolidaritas kepada Ni Una Menos Argentina yang tengah mendorong legalisasi aborsi. UU Legalisasi aborsi kemudian berhasil disahkan dengan 38 mendukung berbanding 29 menentang. Melalui undang-undang ini, kini masyarakat Argentina dapat mengakses aborsi aman di fasilitas kesehatan secara bebas dan tanpa hambatan.

Daftar Pustaka

Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Amnesty International. (2018). *Argentina: Amnesty International calls on President Macri to address key human rights issues*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/argentina-amnistia-internacional-pide-al-presidente-macri-que-aborde-cuestiones-clave-de-derechos-humanos/>

Anderson, C. F. (2022). Legalising Abortion in Argentina: Social Movements and Multi-Party Coalitions. *Journal of Politics in Latin America*, 14(2), 143–165. <https://doi.org/10.1177/1866802X221100274>

Araujo, M. M. y. (2006). Argentina after the Nineties: Changes in Social Structure and Political Behavior. In R. Feinberg, C. H. Waisman, & L. Zamosc (Eds.), *Civil Society and Democracy in Latin America*. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781403983244>

BBC.com. (2018). *Argentina abortion: Senate defeats bill after polarising debate*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45125687>

Bellucci, M. (1997). Women's struggle to decide about their own bodies: Abortion and sexual rights in Argentina. *Reproductive Health Matters*, 5(10), 99–106. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(97\)90090-2](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(97)90090-2)

Belotti, F., Comunello, F., & Corradi, C. (2021). Femicidio and #NiUna Menos: An Analysis of Twitter Conversations During the First 3 Years of the Argentinean Movement. *Violence Against Women*, 27(8), 1035–1063. <https://doi.org/10.1177/1077801220921947>

Blofield, M. (2013). *The Politics of Moral Sin*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203960233>

Blofield, M., & Ewig, C. (2017). The Left Turn and Abortion Politics in Latin America. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 24(4), 481–510. <https://doi.org/10.1093/sp/jxx018>

Brown, J. C. (2011). *A brief history of Argentina*. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.41-0491>

Buedo, A. M. (2020). Pregnancy, Femicide, and the Indispensability of Legalizing Abortion: A Comparison between Argentina and Ireland. *Emory International Law Review*, 34(3).

Carlborg, N. (2024). *Bridging Theory and Activism: Exploring the Ni Una Menos Movement in Argentina through Political Process theory and Feminist Lens*. Malmö University.

Caselli, I. (2018). Campaign lines: Can other campaigners learn from Argentina's same-sex marriage advocates how to win change? *Index on Censorship*, 47(3), 42–45. <https://doi.org/10.1177/0306422018800257>

Chenou, J.-M., & Cepeda-Másmela, C. (2019). #NiUnaMenos: Data Activism From the Global South. *Television & New Media*, 20(4), 396–411. <https://doi.org/10.1177/1527476419828995>

Daby, M., & Moseley, M. W. (2022). Feminist Mobilization and the Abortion Debate in Latin America: Lessons from Argentina. *Politics & Gender*, 18(2), 359–393. <https://doi.org/10.1017/S1743923X20000197>

de las Nieves Puglia, M., Palumbo, M., & Vazquez Laba, V. (2018). *La Argentina Anti-punitivista Que Supimos Construir*. Anfibia. <https://www.revistaanfibia.com/argentina-anti-punitivista/>

Dhewy, A. (2017). *HKSR dan Kebijakan Pembangunan*.

Enloe, Cynthia. (1989). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. London: Pandora

Francome, C. (2016). *Unsafe Abortion and Women's Health*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315548968>

Gago, V. (2020). *Feminist International: How to Change Everything*. Verso.

Gudiño Bessone, P. (2020). Debates about the Legalization of Abortion in Argentina: The Catholic Church and its Relationships with the Presidential Governments under Democracy (1983- 2018). *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, 47(87), 87–117. <https://doi.org/10.21678/apuntes.87.1001>

Haq, A. T., Syahdan, P., & Abdullah, H. (2021). Strategi Gerakan Sosial Transnasional dalam Kampanye Perdamaian Internasional (Studi Kasus: Food Not Bombs). *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(1), 36–52. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i1.12721>

Hernandes, J. (2022). *How green became the color of the abortion rights movement*. NPR. <https://www.npr.org/2022/06/27/1107717283/abortion-rights-green-symbol>

Htun, M. (2003). *Sex and the State: Abortion, Divorce, and the Family under Latin American Dictatorships and Democracies*. New School University.

Human Rights Watch. (2005). *Decisions Denied: Women's Access to Contraceptives and Abortion in Argentina*.
<https://www.hrw.org/reports/2005/argentina0605/argentinasidebars.pdf>

Jost-Creegan, K. M. (2017). Debts of Democracy: Framing Issues and Reimagining Democracy in Twenty-First Century Argentine Social Movements. *Harvard Human Rights Journal*, 30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4932733>

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179>

Keck, M. E., & Sikkink, K. (2014). *Activists beyond Borders*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801471292>

Langlois, A. (2020). #NiUnaMenos: countering hegemonies in Argentina. London School of Economics and Political Science. <https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/02/10/niunamenos-countering-hegemonies-in-argentina/>

Ludong, M. J., Culla, A. S., & Syahdan, P. (2019). Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan Ham di Argentina. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2).

Medina, M. C. (2023). The feminization of resistance: the narratives of #NiUnaMenos as social transformative action. *Journal of Political Power*, 16(2), 237–253. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2023.2251109>

Misculin, N. (2020). “We did it, sisters”: Argentina Senate votes to legalize abortion. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/we-did-it-sisters-argentina-senate-votes-to-legalize-abortion-idUSKBN2940LF/>

Monteverde, M., & Tarragona, S. (2019). Safe and unsafe abortions: Total monetary costs and health care system costs in Argentina in 2018. *Salud Colectiva*, 15. <https://doi.org/10.18294/sc.2019.2275>

Morgenstern, A. P. (2012). *Morality and Contentious Politics in Latin America: Abortion and LGBT Rights in Argentina and Mexico* [Dissertation]. University of Miami.

Mulinari, D. (2023). In Green and White: Feminist Struggles for Abortion Rights in Argentina. In *Struggles for Reproductive Justice in the Era of Anti-Genderism and Religious Fundamentalism* (pp. 11–37). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31260-1_2

- Munson, Z. (2020). *Abortion Politics* (Vol. 98). <https://doi.org/10.1093/sf/soz115>
- Oviya, A. J. (2020). #NiUnaMenos: Women and protest movements in Latin America. *NIAS Global Politics Course*, 2(2 & 3).
- Paley, D. M., Hopkins, A., & Cano, L. (2023). *How Mexican Feminists Became Enemies of the State*. NACLA. <https://nacla.org/mexican-feminists-enemies-state>
- Palmeiro, C. (2018). The Latin American Green Tide: Desire and Feminist Transversality. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 27(4), 561–564. <https://doi.org/10.1080/13569325.2018.1561429>
- Palmeiro, C. (2020). Ni Una Menos and the Politics of Translation. *Politics of Reproduction*, 6.
- Panico, C. (2018). Feminizing technopolitics. Leaderless movements in Southern Europe, from 15M to Ni Una Menos. *Cescontexto - Debates*, 2.
- Pasinato, W., & de Ávila, T. P. (2023). Criminalization of femicide in Latin America: Challenges of legal conceptualization. *Current Sociology*, 71(1), 60–77. <https://doi.org/10.1177/00113921221090252>
- Paxman, J. M., Rizo, A., Brown, L., & Benson, J. (1993). The Clandestine Epidemic: The Practice of Unsafe Abortion in Latin America. *Studies in Family Planning*, 24(4), 205. <https://doi.org/10.2307/2939189>
- Politi, D., & Londoño, E. (2021). *How Support for Legal Abortion Went Mainstream in Argentina*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2021/01/01/world/americas/argentina-abortion.html>
- Ramos, S., Romero, M., & Ramón Michel, A. (2014). Health care providers' opinions on abortion: A study for the implementation of the legal abortion public policy in the Province of Santa Fe, Argentina. *Reproductive Health*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-72>
- Ruibal, A. (2022). *Abortion in Argentina: Movement Expansion, the Green Wave and Legalization*. Fos Feminista. <https://fosfeminista.org/wp-content/uploads/2023/05/Fos-Feminista-Policy-Brief-Argentina-ENG-v4.pdf>
- Shawki, N. (2010). Political Opportunity Structures and the Outcomes of Transnational Campaigns: A Comparison of Two Transnational Advocacy Networks. *Peace & Change*, 35(3), 381–411. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.2010.00640.x>
- Smith, S. (2017). *Introducing Feminism in International Relations Theory*. In S. Mcglinchey, R. Walters, & C. Scheinpflug (Eds.), *International Relations Theory*. E-International Relations Publishing.

Soetjipto, A. (2018). *Transnasionalisme - Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sola-Santiago, S. (2022). *What The Green Scarf Means In The Fight For Reproductive Rights*. Refinery29. <https://www.refinery29.com/en-gb/2022/05/10983662/green-scarf-meaning-roe-v-wade-protests>

Sosa, C. (2021). Mourning, Activism, and Queer Desires: Ni Una Menos and Carri's Las hijas del fuego. *Latin American Perspectives*, 48(2), 137–154. <https://doi.org/10.1177/0094582X20988699>

Suryana. (2010). *Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Tarrow, S. (2005). *The New Transnational Activism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511791055>

Taylor, B., Daby, M., Moseley, M., & Erica Smith, A. (2021, January 18). *Argentina legalized abortion. Here's how it happened and what it means for Latin America*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/18/argentina-legalized-abortion-heres-how-it-happened-what-it-means-latin-america/>

Teichert, E. (2023). *Feminism as Celebration: Photography and Abortion Activism in Argentina*. MAI:Feminism and Visual Culture. <https://maifeminism.com/feminism-desire-celebration-photography-legal-abortion-activism-in-argentina/>

Vallely, P. (2015). *Pope Francis: Untying the Knots* (2nd ed.). Bloomsbury Publishing.

Van Aelst, P., & Walgrave, S. (2002). New media, new movements? The role of the internet in shaping the 'anti-globalization' movement. *Information, Communication & Society*, 5(4), 465–493. <https://doi.org/10.1080/13691180208538801>

Varela, P. (2018). *Argentina's Anticapitalist Feminism*. Jacobin. <https://jacobin.com/2018/09/argentinas-anticapitalist-feminism>

Young, J. G. (2015). *The Catholic Church & Argentina's Dirty War*. Commonweal Magazine.